

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menjadi catatan tersendiri dalam era revolusi industri 4.0 dan bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia. Tingginya jumlah penduduk berusia produktif pada era tersebut merupakan tantangan yang akan dihadapi Indonesia beberapa tahun ke depan (Kemendikbud, 2017).

Kondisi yang demikian memberikan tantangan dan peluang pada dunia pendidikan untuk lebih berperan dalam mempersiapkan SDM yang unggul. Sejak tahun 2013 pemerintah telah menerapkan kurikulum 2013 untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut. Kurikulum 2013 telah diterapkan secara bertahap di seluruh Indonesia di sekolah tingkat menengah. Ini menggunakan desain pendidikan berbasis tematik yang membantu siswa untuk berpikir secara logis dan dalam cara terintegrasi. Selain itu, mereka mengajarkan tentang nilai, sikap, dan karakter siswa sebagai cara untuk membangun karakter positif (Muhammad & Saparahayuningsih, 2016)

Dalam praktek di lapangan, terjadi kondisi yang berbeda dengan yang direncanakan. Para pendidik lebih menyukai untuk mendidik menggunakan konsep awal abad ke-20, konsep tradisional yang dianut dari "kurikulum adalah bahwa itu adalah kumpulan mata pelajaran atau materi pelajaran yang disiapkan oleh para pendidik." Itu identik dengan "program studi" dan "silabus".

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal sebagai wahana utama dalam

pembangunan bangsa dan karakter. Pendidikan Nasional Indonesia haruslah dapat diandalkan dalam menuntun arah pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter kuat, memiliki pengetahuan dan kompetensi yang tinggi agar bisa hidup mandiri dalam kehidupan masyarakat dunia yang semakin terbuka dan sangat kompetitif sekarang ini. Sesuai dengan visi Pendidikan Nasional Indonesia yakni “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.

Suwarno mengutip beberapa definisi pendidikan dari para pakar, di antaranya John Dewey yang menyebutkan pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia (Kaimuddin, 2014), Emile Durkheim (1956) sebagaimana dikutip oleh Astuti (2023) melihat pendidikan sebagai proses sosial yang berfungsi mentransmisikan norma dan nilai masyarakat kepada generasi muda, sehingga individu menjadi bagian dari tatanan sosial (P. Astuti et al., 2023). Paulo Freire (1970) mendefinisikan pendidikan sebagai upaya pembebasan manusia dari penindasan melalui kesadaran kritis. Ia menentang model “banking education” dan menekankan dialog serta partisipasi aktif peserta didik (Mahur et al., 2019). Ki Hajar Dewantara (1935) dalam konteks Indonesia memandang pendidikan sebagai usaha menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. (Asnawan, 2020). UNESCO (2021) mendefinisikan pendidikan sebagai hak asasi manusia dan kunci pembangunan berkelanjutan, yang mencakup pembelajaran sepanjang hayat serta pemberdayaan individu. (Miseliunaite et al., 2022).

Secara konseptual, pendidikan dipahami sebagai proses yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, nilai, dan kesadaran sosial individu. Dari perspektif filosofis, pendidikan berfungsi membangun manusia yang merdeka secara berpikir dan bertanggung jawab

terhadap dirinya dan masyarakatnya. Dari sisi sosiologis, pendidikan berperan sebagai mekanisme sosial yang memastikan keberlanjutan nilai-nilai, norma, dan kebudayaan suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Durkheim dan Dewantara yang menempatkan pendidikan sebagai alat integrasi sosial dan pembentukan identitas nasional. Secara modern, pendidikan juga dilihat sebagai instrumen pemberdayaan, sebagaimana ditegaskan oleh Freire dan UNESCO. Pendidikan di abad ke-21 tidak hanya menekankan kompetensi kognitif, tetapi juga kesadaran kritis, kreativitas, dan keadilan sosial untuk mencapai keberlanjutan global. Dengan demikian, pendidikan ideal adalah yang mampu mengharmonikan aspek intelektual, moral, sosial, dan spiritual manusia.

Dasar pemikiran di atas menghasilkan sebuah ikhtiar dari pemerintah untuk merancang sebuah acuan kurikulum perguruan tinggi dengan tujuan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, lahirlah Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan tujuan utama untuk mendekatkan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan antara dunia pendidikan dengan pelatihan dan pengalaman kerja. Meskipun kebijakan pemerintah tentang penerapan KKNI di perguruan tinggi tidak turut serta memberikan dampak langsung terhadap perubahan pola kurikulum di setiap program studi namun penyesuaian materi pembelajaran (contents) sudah mulai diajarkan kepada mahasiswa.

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2014) melalui *Permendikbud No. 81 Tahun 2014*, menjelaskan bahwa SKPI merupakan dokumen resmi yang menyertai ijazah untuk menjelaskan kompetensi akademik, capaian pembelajaran, serta pengalaman non-akademik mahasiswa. Tujuannya adalah agar lulusan memiliki deskripsi yang komprehensif tentang kemampuan dan prestasi mereka, bukan hanya nilai akademik formal (Kemendikbudristek, 2009).

Sedangkan Sijabat et al. (2020) mengatakan bahwa implementasi SKPI penting karena berfungsi sebagai *credential transparency tool* yang membantu dunia kerja memahami profil kompetensi lulusan secara lebih akurat dan relevan. Hal ini juga memperkuat posisi universitas dalam sistem *Outcome-Based Education (OBE)* (Sijabat, Daniel Rudiaman, 2017).

Implementasi SKPI menjadi program di tingkat perguruan tinggi yang memiliki hambatan dan tantangan sehingga hal ini memerlukan control yang baik dari perguruan tinggi. Namun problemnya antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain mempunyai sistem yang berbeda dalam melihat ketercapaian SKPI. Beberapa program yang dilaksanakan di universitas wilayah bekasi adalah TOEFL Preparation, Uji Kompetensi, Pelatihan Brevet, Seminar, Pelatihan analisis data dan Pelatihan kepemimpinan. Surat keterangan pendamping ijazah sejatinya merupakan sistem yang berfungsi untuk mendukung pendataan prestasi dan kegiatan mahasiswa (Widya et al., 2025) ke depannya. Sehingga berimbas positif terhadap kurikulum yang sesuai dengan KKNI.

Penerapan kurikulum yang mengacu KKNI sesungguhnya memperjelas seperti apa profil lulusan dari setiap Prodi dan learning outcomes (capaian pembelajaran) seperti apa yang didapatkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan, sehingga penyusunan kurikulum benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi yang diinginkan setiap Prodi. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan akan memiliki kemampuan yang setara dengan kemampuan (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan secara sistematis sesuai dengan KKNI pada masing-masing prodi tersebut

Kurikulum berbasis KKNI dimaksudkan juga agar dapat mengurangi kesenjangan antara kompetensi kebutuhan dunia kerja dengan mutu lulusan suatu lembaga pendidikan. Hal ini setidaknya perguruan tinggi mampu menggabung pembelajaran teori dan praktek yang dikemas sedemikian rupa sehingga berdampak terhadap capaian lulusannya (I. I. Astuti et al., 2025). Sinkronisasi hal tersebut berdampak pada penyerapan

tenaga kerja secara efektif dan sesuai dengan bidangnya masing-masing serta memiliki kompetensi yang diharapkan. Dampak dari penerapan kurikulum berbasis KKNI adalah masyarakat Indonesia harus memiliki sikap dan tata nilai keindonesiaan, kemampuan, pengetahuan sekaligus mendapat tanggung jawab dan hak atas capaian pembelajaran yang dilakukannya sesuai dengan level dalam KKNI. Sedangkan dari segi penguatan kelembagaan, kurikulum berbasis KKNI berguna untuk menguatkan dan meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa serta untuk meningkatkan level suatu perguruan tinggi dari segala aspek dan lingkungannya

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan vokasi. Salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung pemenuhan kompetensi lulusan yakni program Merdeka Belajar-Universitas Merdeka (MBKM). Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Adanya program MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja yang sangat kompetitif dan mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar, dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar Universitasnya (Sari et al., 2025). Tujuan utama MBKM adalah meningkatkan kompetensi lulusan, baik dalam soft skills maupun hard skills, untuk lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini dan menghasilkan pemimpin masa depan yang berkualitas

Kebijakan MBKM sejalan dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa, dan mitra terlibat dalam melaksanakan aturan ini. Perguruan tinggi perlu menyediakan opsi bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi mereka, dan fakultas harus

menyusun daftar mata kuliah lintas program studi serta kerja sama dengan mitra yang relevan. Salah satu cara konkret untuk menggambarkan pencapaian pembelajaran mahasiswa adalah dengan digunakan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau SKPI yang sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 73 Tahun 2013. Dengan adanya SKPI, rekam jejak mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dan program MBKM dengan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang menjadi portofolio kemampuan dan pengalaman dapat terwadahi di dalamnya

Selain itu dengan menerbitkan SKPI maka implementasi kebijakan MBKM secara substansial dapat mendukung pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan softskill dan hardskill, mumpuni dalam aspek leadership dan kepribadian. Beberapa Universitas sudah menjalankan penerbitan SKPI, ada yang sudah berbasis teknologi sistem informasi dan ada pula yang masih manual menggunakan formulir cetak (Tampubolon & Gulo, 2025). Berikut permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SKPI:

1. Pemahaman yang terbatas

Banyak mahasiswa, lulusan, dan bahkan beberapa pihak di perguruan tinggi kurang memahami tujuan dan manfaat SKPI. Akibatnya, SKPI sering dianggap sebagai dokumen tambahan yang tidak penting, dan proses penyusunannya sering terlewatkan dan tidak diprioritaskan.

2. Kurangnya standarisasi

Disamping hal tersebut diatas, didapatkan kenyataan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan peraturan tentang SKPI yang mengatur hal – hal secara umum sehingga penerapan di masing–masing perguruan tinggi berbeda. Hal ini menyebabkan keragaman dalam format, konten, dan penilaian, yang dapat memengaruhi kredibilitas dan kemampuan lulusan untuk dibaca oleh dunia kerja.

3. Proses yang lama dan tidak efisien

Disamping itu, pembuatan SKPI dapat memakan waktu yang lama dan melibatkan beberapa tahap verifikasi, seperti meninjau kegiatan ekstrakurikuler, pengalaman kerja, atau sertifikasi tambahan. Seringkali, penerbitan SKPI tertunda karena birokrasi yang rumit.

4. Minimnya pengakuan di dunia kerja

Disamping itu, banyak perusahaan dan institusi dunia kerja yang belum sepenuhnya memahami atau mengakui SKPI. Mereka lebih fokus pada ijazah dan transkrip nilai saja, sehingga lulusan merasa SKPI tidak memberikan manfaat tambahan yang signifikan dalam proses perekrutan

5. Tantangan digitalisasi

Meskipun beberapa perguruan tinggi mulai beralih ke sistem digital, masih ada kendala dalam hal infrastruktur, keamanan data, dan kompatibilitas antar sistem. Hal ini dapat memperlambat penerapan SKPI berbasis digital yang lebih efisien dan mudah diakses

6. Kurangnya sosialisasi dan kolaborasi dengan industri

Terkadang, isi dari SKPI tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan industri atau pasar kerja. Kurangnya kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia industri membuat SKPI kurang relevan dalam menggambarkan kompetensi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja

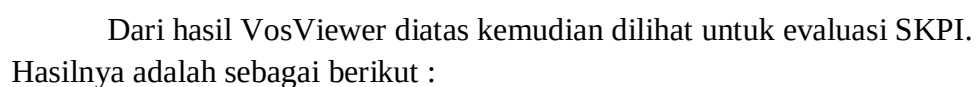
7. Validasi dan verifikasi yang lemah

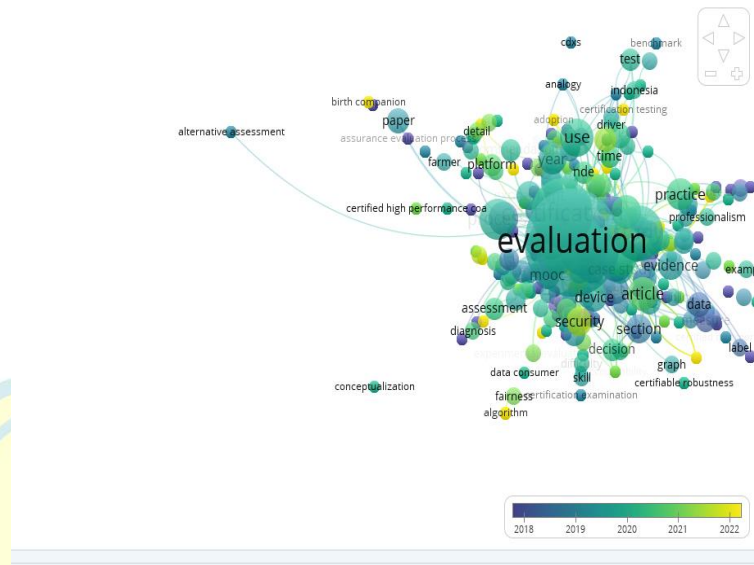
Ada kekhawatiran tentang kebenaran data SKPI. Tanpa mekanisme validasi dan verifikasi yang kuat, ada risiko data yang tidak akurat atau tidak sah muncul.

Evaluasi memiliki langkah-langkah, seperti yang dikatakan Edward A. Suchman. Berikut ini langkah-langkah evaluasi kebijakan: melakukan identifikasi terhadap tujuan program, analisis permasalahan, deskripsi dan standarisasi kegiatan, melakukan pengukuran pada setiap tahap perubahan, menetapkan penyebab yang menciptakan perubahan, dan indikator-indikator penentu kemunculan dampak. Dari keenam tahap tersebut, menurutnya melakukan identifikasi terhadap masalah adalah tahap paling krusial.

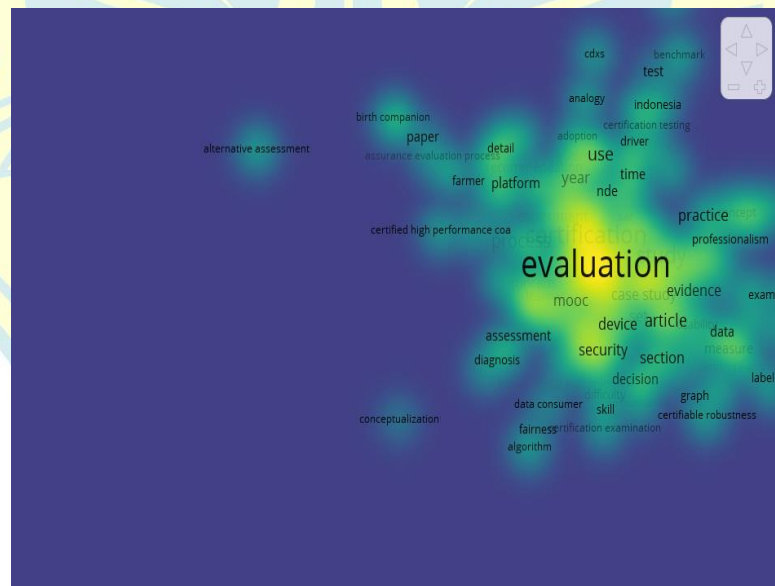
Atas dasar hal diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang program SKPI yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang ada di wilayah Kota Bekasi dengan melakukan evaluasi menggunakan kombinasi model CIPP dan Kirkpatrick yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang, input, proses, produk serta dampak dari pelaksanaan program tersebut.

Dari hasil pencarian journal penelitian yang membahas tentang SKPI dari tahun 2018 sampai dengan 2024 peneliti mengambil 200 journal yang membahas SKPI. Hasil dari VosViewer adalah sebagai berikut :





Dari hasil vosviewer dapat dilihat bahwa evaluasi program yang telah diteliti adalah tentang evaluasi SKPI, Peneliti menemukan masih sedikit yang meneliti mengenai SKPI.



Dapat dilihat bahwa warna yang diwakili evaluasi pada vosviewer berwarna kuning yang berarti penelitian tersebut baru dilakukan pada tahun 2018. Dan dari jurnal penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang evaluasi implementasi surat keterangan pendamping ijazah yang menggunakan model kirkpatrick dan CIPP.

Dari uraian state of the art, kombinasi model CIPP dan Kirkpatrick diperlukan dalam evaluasi SKPI karena:

1. Memberikan perspektif sistemik dan empiris, mencakup kebijakan, implementasi, hingga hasil nyata.
2. Meningkatkan validitas evaluasi, karena menilai aspek konteks dan hasil perilaku sekaligus.
3. Mendukung akuntabilitas dan peningkatan mutu pendidikan tinggi, terutama dalam sistem MBKM dan sertifikasi kompetensi nasional.

Atas dasar tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (Novelty) pada penerapan model yang mengintegrasikan konteks, reaksi, proses, learning dan produk (CR – PLP) yang diambil dari kombinasi model CIPP dan Kirkpatrick. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya mengevaluasi secara parsial misalnya hanya pada aspek input, implementasi kurikulum, atau capaian output jangka pendek penelitian ini menelusuri jalur sebab akibat secara komprehensif dari konteks, reaksi, proses, learning dan produk program.

Penelitian ini juga menawarkan kebaruan pendekatan evaluasi melalui penerapan evaluasi yang holistik dan kontekstual dalam menilai efektivitas Program SKPI. Pendekatan holistik dilakukan dengan mengintegrasikan konteks, reaksi, proses, learning dan produk program sehingga evaluasi tidak berhenti pada aspek administratif atau implementatif, tetapi menilai dampak nyata program secara utuh. Pendekatan kontekstual dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil masing-masing universitas, seperti karakteristik peserta, ketersediaan fasilitas, tingkat keterlibatan DUDI, serta dinamika pelaksanaan program

Dengan pendekatan ini, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa SKPI benar-benar mencerminkan kualitas lulusan dan berfungsi sebagai instrumen penghubung antara dunia akademik dan dunia kerja. Dengan

demikian, kombinasi CIPP dan Kirkpatrick dianggap sebagai *hybrid evaluation framework* yang paling relevan untuk memastikan bahwa SKPI tidak hanya sesuai kebijakan tetapi juga efektif meningkatkan daya saing lulusan.

Penelitian ini memandang implementasi SKPI sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sub-sistem yang saling terkait sehingga terkonstruksi pola hubungan antar dimensi evaluasi dalam implementasi SKPI. Dengan menggunakan kerangka CIPP yang telah dimodifikasi, hubungan antar dimensi dieksplorasi untuk menemukan pola kausalitas dan intervensi.

a. Hubungan Dimensi Konteks dan Input

Analisis hubungan ini bertujuan untuk menguji kesesuaian antara kebutuhan eksternal (konteks) dengan kebijakan internal perguruan tinggi (input).

- **Konteks:** Meliputi kebijakan nasional KKN, kebutuhan dunia industri di wilayah Bekasi (kawasan industri terbesar di Asia Tenggara), serta persepsi pemangku kepentingan terhadap urgensi SKPI.
- **Input:** Meliputi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola, sistem teknologi informasi (SI-SKPI), anggaran, dan pedoman akademik. Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa kesenjangan dalam dimensi konteks (misalnya, rendahnya pemahaman industri tentang SKPI) akan berdampak negatif terhadap komitmen perguruan tinggi dalam menyediakan input yang memadai.

b. Hubungan Dimensi Proses dan Produk

Dimensi proses mengevaluasi bagaimana SKPI disusun, divalidasi, dan diterbitkan. Apakah melibatkan pembimbing akademik? Apakah data capaian mahasiswa terintegrasi dengan baik? Dimensi produk mengevaluasi keluaran langsung (jumlah SKPI terbit, ketepatan waktu) dan hasil jangka menengah (manfaat SKPI bagi lulusan dalam melamar pekerjaan).

Penelitian ini akan menguji apakah kualitas proses (validasi data yang ketat, akurasi deskripsi kompetensi) berkorelasi positif dengan

kualitas produk (penerimaan SKPI oleh pengguna lulusan). Jika proses lemah, produk SKPI berisiko menjadi "formalitas belaka" tanpa nilai tambah.

c. Hubungan Timbal Balik (Reciprocal Relationship)

Mengadopsi pandangan sistemik, penelitian ini juga melihat hubungan timbal balik. Misalnya, produk yang buruk (SKPI tidak dipakai industri) seharusnya menjadi umpan balik (feedback loop) untuk memperbaiki konteks (sosialisasi ulang ke industri) atau memperbaiki proses (reformulasi deskripsi capaian pembelajaran). Analisis ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling (SEM)* atau analisis jalur untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel laten dari setiap dimensi.

C. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan rumusan masalah:

1. **Context**, bagaimana latar belakang program surat keterangan pendamping ijazah?
2. **Reaction**, bagaimana reaksi dari peserta terhadap pelatihan yang diikuti?
3. **Proses**, Bagaimana implementasi program surat keterangan pendamping ijazah?
4. **Learning**, Bagaimana perubahan sikap peserta terhadap program surat keterangan pendamping ijazah?
5. **Product**, Bagaimana keputusan yang dibuat oleh perguruan tinggi terhadap program yang telah dilaksanakan ?

Adapun penelitian ini hanya dibatasi pada kajian evaluasi dari SKPI di Universitas Pertiwi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apa latar belakang program surat keterangan pendamping ijazah?
2. Untuk mengetahui bagaimana reaksi peserta terhadap program yang diikuti?

3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program surat keterangan pendamping ijazah?
4. Untuk mengetahui bagaimana perubahan sikap peserta setelah mengikuti program surat keterangan pendamping ijazah?
5. Untuk mengetahui bagaimana keputusan yang dibuat oleh perguruan tinggi setelah program dilaksanakan?

E. Manfaat dan Signifikansi

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis
Merupakan Pengalaman yang menarik dan guna menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman khususnya mengenai evaluasi dengan menggunakan kombinasi model
2. Bagi Perguruan Tinggi
Semoga menjadi bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang seberapa pentingnya evaluasi program.
3. Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan dapat dijadikan referensi tambahan bagi penulis

F. Kombinasi Model

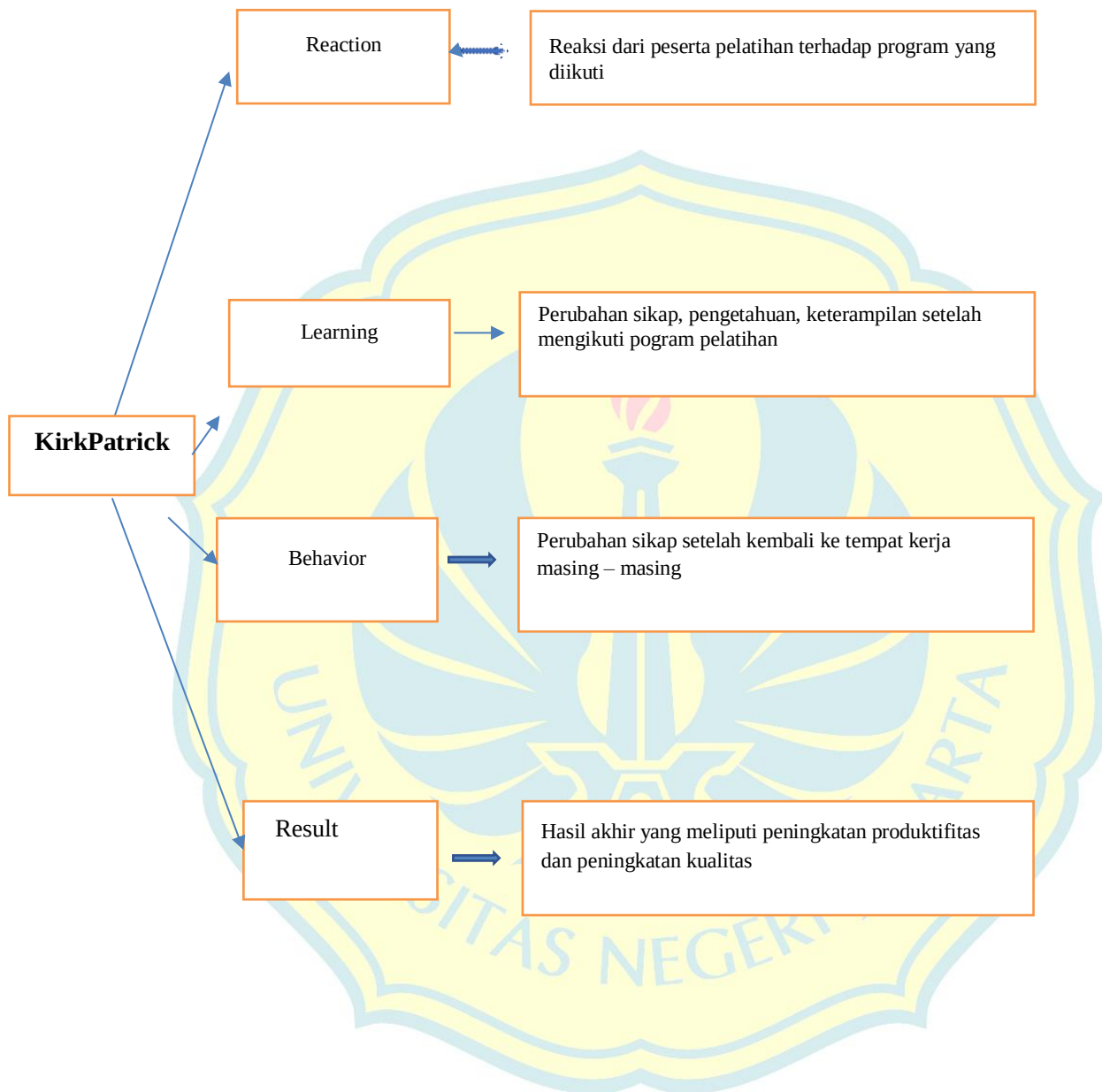
Model evaluasi ini banyak digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan, dikembangkan oleh Kirkpatrick dengan empat level yaitu: “reaction, learning, behavior, results”. Reaction, mengevaluasi terhadap reaksi peserta pelatihan dengan mengukur kepuasan peserta. Program dirasakan lebih efektif bila proses pelatihan dirasa menyenangkan dan memuaskan bagi peserta pelatihan, sehingga peserta termotivasi untuk belajar dan berlatih. Sebaliknya apabila peserta merasa tidak puas maka peserta tidak akan termotivasi untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut., Learning, didefinisikan sebagai perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, dan peningkatan ketrampilan peserta setelah selesai mengikuti program, Behavior, perubahan sikap peserta pelatihan setelah peserta kembali

ketempat kerja masing-masing. Bagaimana peserta dapat mentransfer pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperoleh selama pelatihan untuk diterapkan di tempat kerja, Results, difokuskan pada hasil akhir yang meliputi peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan kuantitas kecelakaan kerja, dan kenaikan keuntungan.

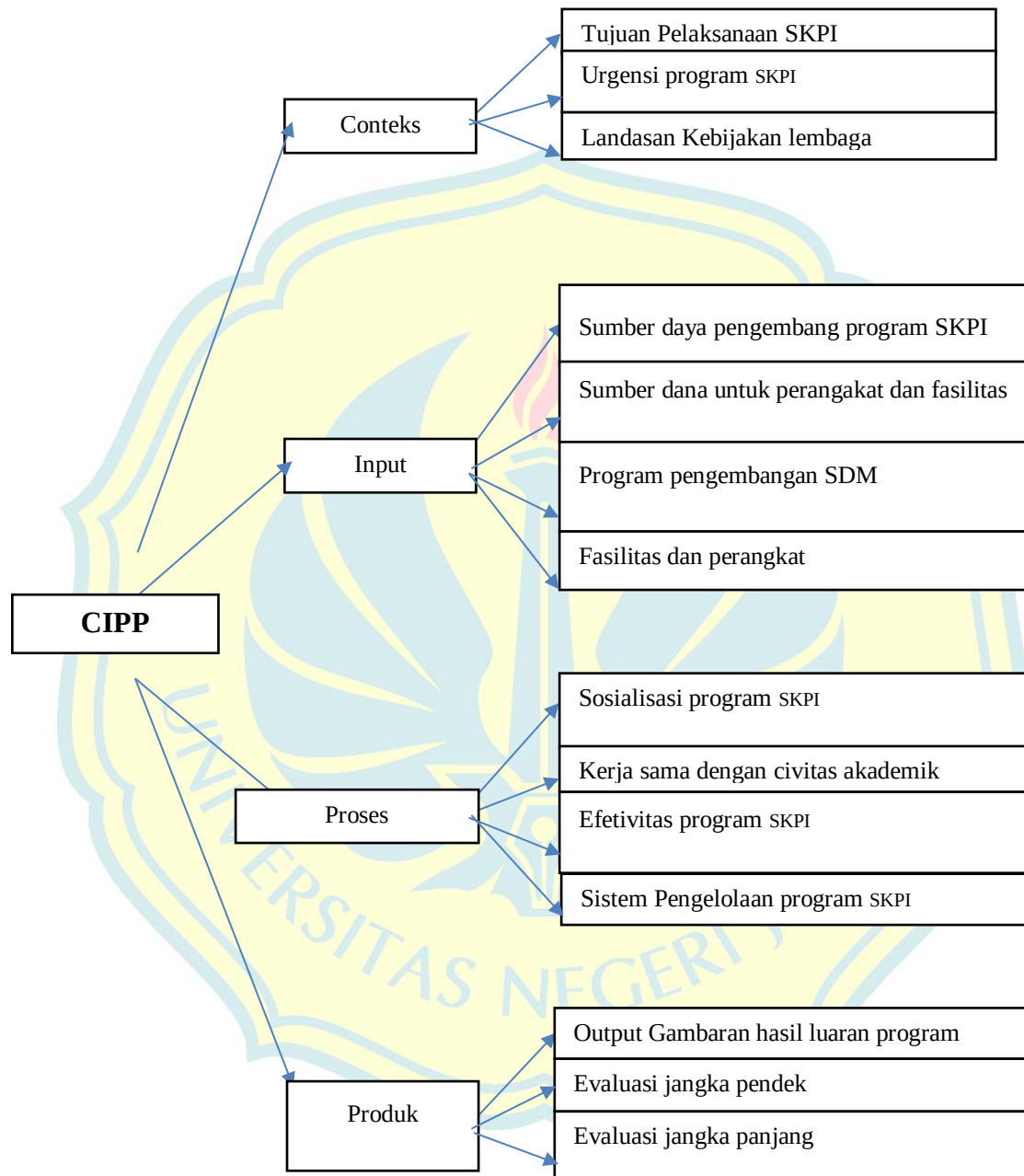
Model CIPP terbentuk dari empat dimensi evaluasi yaitu evaluasi Context, Input, Process, dan Product. Keempat evaluasi ini merupakan suatu rangkaian keutuhan, walaupun dalam pelaksanaannya seseorang dapat saja hanya melakukan satu jenis atau kombinasi dari dua atau lebih dimensi evaluasi, namun sesungguhnya kekuatan model terletak dari rangkaian kegiatan keempat jenis evaluasi itu sendiri (Daryanto. 2005). Dalam pandangan Stufflebeam, bahwa tujuan yang paling penting adalah bukan membuktikan, tetapi memperbaiki. “the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not prove but to improve”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kombinasi model KirkPatrick dan CIPP, dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang, reaksi peserta terhadap program, implementasi program, perubahan sikap peserta setelah mengikuti program, keputusan yang dibuat pihak perguruan tinggi setelah program dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar kombinasi yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif (Salman et al., 2025) dan mudah dalam melakukan kontrol output ataupun hasil evaluasi terkait SKPI dari mahasiswa.

Gambar 1. 1 Sintak Model Evaluasi Kirk Patrick



Gambar 1. 2 Sintak Model Evaluasi CIPP



Keterangan Syntax

Conteks

Berfungsi untuk menilai latar belakang, kebutuhan, dan tujuan dari pelaksanaan program SKPI. Fokus utamanya adalah sejauh mana program ini dibutuhkan dan bagaimana landasan kebijakan mendukung implementasinya.

Dalam sintak di gambar, terdapat tiga aspek evaluatif utama:

- Tujuan Pelaksanaan SKPI: Menilai kesesuaian tujuan program dengan kebutuhan mahasiswa dan arah kebijakan pendidikan tinggi nasional.
- Urgensi Program SKPI: Mengidentifikasi mengapa SKPI penting diterapkan di perguruan tinggi, terutama dalam menyiapkan lulusan yang berdaya saing.
- Landasan Kebijakan Lembaga: Menganalisis dasar hukum dan kebijakan universitas yang mendukung pelaksanaan SKPI (misalnya Permendikbud No. 81 Tahun 2014).

Input

Menilai sumber daya dan strategi yang digunakan dalam melaksanakan program. Bagian ini menyoroti kesiapan institusi dalam menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang mendukung SKPI.

Empat komponen utama yang dijelaskan dalam sintak Anda adalah:

- Sumber daya pengembang program SKPI: Menilai kompetensi tim pelaksana dan ketersediaan struktur organisasi pengelola SKPI.
- Sumber dana untuk perangkat dan fasilitas: Mengidentifikasi alokasi anggaran dan dukungan pembiayaan untuk keberlanjutan program.
- Program pengembangan SDM: Mengevaluasi pelatihan dan peningkatan kapasitas staf akademik yang terlibat dalam pengelolaan SKPI.
- Fasilitas dan perangkat: Menilai kelayakan infrastruktur seperti sistem informasi akademik, perangkat digital, dan fasilitas administrasi pendukung.

Proses

Implementasi menilai **bagaimana implementasi SKPI dijalankan** di lapangan. Proses dievaluasi dari segi mekanisme pelaksanaan, keterlibatan civitas akademika, efektivitas sistem, dan mekanisme pengelolaan administrasi.

Dalam gambar Anda, empat unsur penting dijabarkan sebagai berikut:

- **Sosialisasi program SKPI:** Menilai sejauh mana program disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen untuk membangun pemahaman bersama.
- **Kerja sama dengan civitas akademika:** Mengukur kolaborasi antarunit akademik, kemahasiswaan, dan teknologi informasi dalam menjalankan SKPI.
- **Efektivitas program SKPI:** Menilai apakah kegiatan pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan menghasilkan dampak nyata terhadap mahasiswa.
- **Sistem pengelolaan program:** Mengevaluasi efektivitas sistem digital atau administrasi manual yang digunakan dalam penerbitan dan verifikasi SKPI.

Produk

Monitoring berfokus pada **hasil, dampak, dan keberlanjutan** dari program SKPI. Evaluasi *Product* menilai sejauh mana program berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Tiga subkomponen pada diagram menjelaskan arah hasil yang diharapkan:

- **Output/gambaran hasil luaran program:** Menilai hasil konkret seperti jumlah mahasiswa penerima SKPI, tingkat ketercapaian indikator kompetensi, dan kepuasan pengguna.
- **Evaluasi jangka pendek:** Menganalisis manfaat langsung SKPI terhadap mahasiswa, misalnya peningkatan kesadaran karier dan motivasi belajar.
- **Evaluasi jangka panjang:** Menilai dampak berkelanjutan terhadap reputasi institusi, daya saing lulusan di dunia kerja, serta keberlanjutan sistem pengelolaan SKPI di masa depan.

Keterpaduan Antardimensi

Model CIPP bersifat **interdependen**, artinya setiap komponen saling memengaruhi.

- *Context* menentukan arah kebijakan dan kebutuhan dasar program.
- *Input* menyediakan sumber daya dan strategi untuk menjawab kebutuhan tersebut.
- *Process* memastikan implementasi berjalan sesuai dengan rencana dan standar mutu.
- *Product* menunjukkan capaian dan efektivitas hasil program.

Dengan demikian, sintak yang Anda tampilkan menggambarkan **alur evaluatif komprehensif** yang dapat digunakan untuk:

1. Menilai efektivitas implementasi SKPI di perguruan tinggi.

2. Memberikan dasar perbaikan kebijakan dan strategi pelaksanaan.
3. Menjamin bahwa pelaksanaan SKPI berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas lulusan dan reputasi institusi.

